

Sampah di Jalanan, Cermin Masyarakat Sakit?

BEBERAPA tahun belakangan ini, sangat mudah ditemui sampah berserakan di jalan-jalan. Terutama di sekitar jalan lingkar dan pinggiran kota. Berbagai bentuk tulisan dipasang untuk mencegah orang membuang sampah di lokasi yang jelas-jelas bukan tempat sampah. Tulisan larangan yang dipasang mulai yang halus, keras, mengancam bahkan dengan gambar hantu.

Tetapi tetap saja, tulisan tidak digubris. Atau pindah membuang sampah ke tempat lain. Sebagian masyarakat kehilangan kesabaran, dengan memasang tulisan yang lebih keras disertai ancaman. Tapi fenomena sampah jalanan tidak berkurang. Pemandangan memalukan ini menurunkan derajat dan wibawa Yogyakarta. Seakan jauh dari peradaban adiluhung.

Tanggungjawab

Siapa mereka sebenarnya? Para pembuang sampah tanpa tanggungjawab, tanpa jiwa dan kotor hati dan perilakunya ini? Tidak diketahui persis. Belum ada surveinya. Tapi bisa dibuat hipotesis. Hipotesis bisa terbukti atau meleset. *Pertama*, adalah mereka yang tidak punya lahan untuk mengelola sampah mandiri di rumah. Atau pemilik kos dan kontrakan yang tidak menyediakan tempat sampah. Ini alasan klasik, umum dan banyak dipakai untuk pembenaran mengotori ciptaan Tuhan.

Bahwa pemerintah tidak hadir menyelesaikan masalah ini, tidak menyediakan tempat sampah secara memadai, nyata benar. Tapi tidak adakah solusi bagi para pemilik lahan terbatas ini? Ada, yaitu mengundang pengelola sampah atau tukang sampah dengan mengeluarkan biaya. Mahal? Relatif. Murka masyarakat, murka korban pemilik lahan yang mereka jadikan buangan sampah, tidak bisa dimintakan maaf. Mereka bisa minta maaf kepada Tuhan. Bagaimana dengan dosa kepada pemilik tanah yang mereka

Muhammad Sayuti

dholimi? Kedholiman ini tidak sebanding dengan biaya mengundang tukang sampah bukan?

Solusi pengelolaan sampah mandiri, bertebaran di media dan di video-video yang tersedia luas. Mungkin tidak 100% efektif. Pertanyaannya : Sudahkah dicoba? Seberapa serius ikhtiar mengelola sampah mandiri dengan komitmen kuat



menyelamatkan alam dan mewariskan dunia yang indah bagi anak dan cucu?

Kedua, mereka adalah orang yang punya lahan, namun banyak alasan untuk tidak mengelolanya dengan bertanggung jawab. Tidak punya waktu. Tidak sempat. Repot! Lalu memilih jalan pintas. *Nrabas*. Kehidupan publik, pemerintahan dan politik adalah cerminan budaya ini. Terstruktur, sistemik dan masif. Korupsi di seluruh sektor. Kebohongan publik di mana-mana. Semua adalah cerminan masyarakatnya. Tidak ada tanggung jawab, bahkan untuk untuk kotoran yang ke luar dari tubuhnya sendiri.

Keseimbangan Ekosistem

Adalah fakta, penduduk DIY tumbuh

dengan cepat. Adalah fakta migrasi ke kota marak. Gunung sampah adalah bukti nyata tidak adanya keseimbangan ekosistem. Kalau penduduk bertambah maka tempat sampah ya harus ditambah. Pengembang perumahan harus diminta bertanggung jawab. Pemerintah yang mengelola pajak masyarakat adalah pengatur kebijakan. Apa konsekuensinya kalau migrasi seperti ini dan perumahan menjamur?

Berapa kapasitas pemerintah untuk mengurus penduduknya? Pemerintah tentu harus mau berbagi tanggung jawab. Wakil rakyat yang beberapa waktu lalu dipilih harus menjalankan kewajiban untuk menjaga kesehatan lahir batin konstituennya. Mereka ingin hidup sehat, adil, bersih dan berhati nyaman.

Semua kembali (lagi) ke pendidikan. Nasib. Masyarakat yang sakit menghasilkan wakil rakyat dan abdi negara yang tidak amanah, dusta politik, dan perilaku korup. Karenanya harus lahir generasi baru yang dididik untuk kesatuan ucapan dan perbuatan. Untuk belajar hidup bermartabat, di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Bukan untuk *nrabas* nilai-nilai ujian. Belajar untuk kehidupan yang santun, untuk akhlak mulia, bukan untuk lulus ujian. Sangat berat pekerjaan guru yang hidup di *zaman edan*. Guru harus tetap waras, mendidik dengan tulus untuk menjaga titipan Tuhan, alam semesta ini. □d

*) **Dr Muhammad Sayuti**, Dosen UAD Yogyakarta

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

TAJUK RENCANA

Keteladanan Tunaikan Kewajiban Zakat

PRESIDEN Jowo Widodo kembali memberi keteladanan dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Dalam acara Zakat Istana bertajuk Nikmat Berzakat: Tenteramnya Muzaki Bahagiannya Mustahik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3), Presiden menyerahkan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (Baznas RI). Setelah Presiden, hal yang sama dilakukan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Tinggi Negara, Direksi BUMN, Pejabat Kementerian Lembaga, serta Kepala Daerah. Ramadan ini tampaknya merupakan tahun ketiga Presiden dan jajarannya di tingkat pusat memberi keteladanan dalam membayar zakat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, selanjutnya kegiatan yang sama juga dilakukan para gubernur beserta jajarannya di berbagai provinsi. Tentu saja penyerahan zakat melalui Baznas Provinsi masing-masing.

Trend keteladanan dalam berzakat pada setiap Ramadan ini kiranya perlu diapresiasi. Sebab, keteladanan ini pasti akan diikuti segenap kaum muslimin. Hal ini akan mendorong kesadaran umat Islam dalam menjalankan salah satu kewajibannya. Harus disyukuri, kesadaran umat Islam dalam menjalankan kewajiban salat sudah cukup tinggi. Terbukti dengan terus bertambahnya jumlah masjid, jumlah jemaah yang beribadah di dalamnya juga semakin banyak.

Namun untuk kewajiban membayar zakat, tentu saja bagi umat Islam yang hartanya sudah mencapai *nishab* (batas minimal diwajibkan membayar zakat) tampaknya masih perlu terus didorong. Terbukti masih jauhnya gap antara potensi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dengan realisasinya. Potensi ZIS secara nasional mencapai Rp 327 triliun, namun ZIS yang terhimpun selama tahun 2023 Rp 32 triliun. Sedangkan untuk DIY, dari potensi Rp 2,275 triliun, yang terkumpul di BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada masih kurang dari Rp 200 miliar.

Karena itulah keteladanan dari para pimpinan dirasa penting. Apalagi yang berkewajiban mengambil zakat dari para

muzakki (orang yang masuk kategori wajib zakat) sebenarnya adalah pimpinan. Perintah ialah zakat dari sebagian harta mereka. (Surat At Taubah ayat 103) memang ditujukan kepada pemerintah, waktu itu Nabi Muhammad SAW yang juga sebagai kepala pemerintahan yang kemudian dilanjutkan para Khalifah. Untuk Indonesia meski bukan negara Islam namun mayoritas penduduknya muslim. Kepala pemerintahan, mulai Presiden juga muslim, begitu juga kebanyakan gubernur dan walikota. Karena itu kepala pemerintahan di level manapun, termasuk di instansi-instansi, khususnya yang muslim, sudah sewajarnya kalau mendorong kaum muslim yang dipimpinnya untuk membayar zakat.

Untuk di DIY, kita bersyukur Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada segenap ASN muslim untuk berzakat, berinfak dan bersedekah. (SE Gubernur DIY No 1 Tahun 2022 tentang imbauan penunaian ZIS serta Bansos di lingkungan Pemda DIY.) Para bupati/walikota se-DIY juga mengeluarkan kebijakan terkait ZIS. Mereka juga terus bergandeng tangan dengan BAZNAS setempat dalam menggalang zakat dan juga menyalurkannya.

Kalau ZIS yang terhimpun banyak, sebenarnya juga akan membantu tugas pemerintah, khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab dana tersebut akan disalurkan kepada mereka yang berhak menerima (8 asnaf, termasuk para faqir miskin) di sekitarnya. Apalagi ZIS yang dihimpunkan BAZNAS dan LAZ tidak hanya disalurkan untuk konsumtif, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka tidak hanya menjadi mustahik (orang yang berhak menerima) terus, tetapi nantinya juga meningkat menjadi muzakki).

Karena itu, sudah sepatutnya kalau bulan suci ini juga dimanfaatkan sebagai momentum mengeluarkan zakat bagi kaum muslimin yang sudah tergolong muzakki. Selain karena sudah menjadi kewajiban, pahalanya juga lebih banyak dibanding di bulan lain. □d

BEBERAPA tahun belakangan ini, sangat mudah ditemui sampah berserakan di jalan-jalan. Terutama di sekitar jalan lingkar dan pinggiran kota. Berbagai bentuk tulisan dipasang untuk mencegah orang membuang sampah di lokasi yang jelas-jelas bukan tempat sampah. Tulisan larangan yang dipasang mulai yang halus, keras, mengancam bahkan dengan gambar hantu.

Tetapi tetap saja, tulisan tidak digubris. Atau pindah membuang sampah ke tempat lain. Sebagian masyarakat kehilangan kesabaran, dengan memasang tulisan yang lebih keras disertai ancaman. Tapi fenomena sampah jalanan tidak berkurang. Pemandangan memalukan ini menukarkan derajat dan wibawa Yogyakarta. Seakan jauh dari peradaban adiluhung.

Tanggungjawab

Siapa mereka sebenarnya? Para pembuang sampah tanpa tanggungjawab, tanpa jiwa dan kotor hati dan perilakunya ini? Tidak diketahui persis. Belum ada surveinya. Tapi bisa dibuat hipotesis. Hipotesis bisa terbukti atau meleset. *Pertama*, adalah mereka yang tidak punya lahan untuk mengelola sampah mandiri di rumah. Atau pemilik kos dan kontrakan yang tidak menyediakan tempat sampah. Ini alasan klasik, umum dan banyak dipakai untuk pembenaran mengotori ciptaan Tuhan.

Bahwa pemerintah tidak hadir menyelesaikan masalah ini, tidak menyediakan tempat sampah secara memadai, nyata benar. Tapi tidak adakah solusi bagi para pemilik lahan terbatas ini? Ada, yaitu mengundang pengelola sampah atau tukang sampah dengan mengeluarkan biaya. Mahal? Relatif. Murka masyarakat, murka korban pemilik lahan yang mereka jadikan buangan sampah, tidak bisa dimintakan maaf. Mereka bisa minta maaf kepada Tuhan. Bagaimana dengan dosa kepada pemilik tanah yang mereka

Muhammad Sayuti

dholimi? Kedholiman ini tidak sebanding dengan biaya mengundang tukang sampah bukan?

Solusi pengelolaan sampah mandiri, bertebaran di media dan di video-video yang tersedia luas. Mungkin tidak 100% efektif. Pertanyaannya : Sudahkah dicoba? Seberapa serius ikhtiar mengelola sampah mandiri dengan komitmen kuat



KR-JOKO SANTOSO

menyelamatkan alam dan mewariskan dunia yang indah bagi anak dan cucu?

Kedua, mereka adalah orang yang punya lahan, namun banyak alasan untuk tidak mengelolanya dengan bertanggung jawab. Tidak punya waktu. Tidak sempat. Repot! Lalu memilih jalan pintas. *Nrabas*. Kehidupan publik, pemerintahan dan politik adalah cerminan budaya ini. Terstruktur, sistemik dan masif. Korupsi di seluruh sektor. Keboghongan publik di mana-mana. Semua adalah cerminan masyarakatnya. Tidak ada tanggung jawab, bahkan untuk untuk kotoran yang ke luar dari tubuhnya sendiri.

Keseimbangan Ekosistem

Adalah fakta, penduduk DIY tumbuh

Harga Beras Meningkatkan, Sejahterakah Petani?

MASALAH tingginya harga beras masih menjadi isu dan perhatian masyarakat termasuk DIY. Mengingat beras merupakan komoditi utama yang dikonsumsi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga harga beras memiliki peran yang sangat penting terjadinya inflasi dalam suatu wilayah. Rilis data BPS menunjukkan bahwa kenaikan harga beras pada Bulan Februari 2024 mempunyai andil inflasi di DI Yogyakarta (*month to month*) sebesar 0,19% atau sekitar separuh dari total inflasi (*month to month*) Bulan Februari 2024 sebesar 0,39%. Dengan andil inflasi komoditi beras yang tinggi tersebut, bagaimana dengan kondisi kesejahteraan petani padi DIY? mengingat petani padi merupakan penyedia gabah sekaligus sebagai individu yang mengkonsumsi beras.

Jika diperhatikan pada fenomena yang terjadi secara umum, maka kenaikan harga beras tentunya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani padi. Karena kenaikan harga beras tersebut juga akan diikuti kenaikan harga jual gabah sebagai produk akhir dari petani padi. Data indeks diterima petani padi di DIY pada rilis data BPS tentang nilai tukar petani menunjukkan bahwa dalam periode Januari - Februari 2024 terjadi kenaikan indeks yang cukup signifikan sebesar 5,97% dari 136,74 pada Januari 2024 menjadi 144,90 pada Februari 2024.

Indikator

Kenaikan indeks diterima petani padi tersebut disebabkan karena terjadinya kenaikan rata-rata harga gabah periode Januari - Februari 2024 sebesar 9,16% dari Rp 7.716,67 menjadi Rp 8.423,81. Di sisi lain, indeks dibayar petani sub kelompok tanaman pangan hanya

Fredy Tjekden

mengalami kenaikan 1,07% dari 123,65 pada Januari 2024 menjadi 124,97 pada Februari 2024. Artinya pendapatan petani padi DIY meningkat lebih dari 5 kali lipat dari pengeluarannya. Ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan terjadi peningkatan kesejahteraan pada petani padi.

Namun, data nilai tukar petani tersebut hanya menggambarkan dari sisi kenaikan harga gabah sebagai pemacu naiknya indeks diterima petani padi serta perubahan harga barang konsumsi rumah tangga, biaya produksi dan penambahan barang modal sebagai pemacu naiknya indeks diterima petani. Hal ini belum menggambarkan kondisi produksi riil dari petani padi. Nilai tukar petani akan menjadi indikator kesejahteraan petani padi jika diikuti dengan terjadinya peningkatan produksi padi.

Data Produksi padi di DIY 2023 menunjukkan telah terjadi penurunan produksi padi dibandingkan tahun 2022. Rilis BPS tentang produksi padi menyatakan selama 2023 produksi padi mencapai 534,11 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) atau menurun sebesar 4,91% (27,59 ribu ton GKG) dibandingkan kondisi selama tahun 2022 yang mencapai 561,70 ribu ton GKG. Fenomena ini menjelaskan bahwa ternyata kenaikan harga gabah yang digambarkan oleh indeks diterima petani padi pada nilai tukar petani tidak dinikmati petani padi.

Membantu Petani

Karena kenaikan harga gabah

dengan cepat. Adalah fakta migrasi ke kota marak. Gunung sampah adalah bukti nyata tidak adanya keseimbangan ekosistem. Kalau penduduk bertambah maka tempat sampah ya harus ditambah. Pengembangan perumahan harus diminta bertanggung jawab. Pemerintah yang mengelola pajak masyarakat adalah pengatur kebijakan. Apa konsekuensinya kalau migrasi seperti ini dan perumahan menjamur?

Berapa kapasitas pemerintah untuk mengurus penduduknya? Pemerintah tentu harus mau berbagi tanggung jawab. Wakil rakyat yang beberapa waktu lalu dipilih harus menjalankan kewajiban untuk menjaga kesehatan lahir batin konstituenya. Mereka ingin hidup sehat, adil, bersih dan berhati nyaman.

Semua kembali (lagi) ke pendidikan. Nasib. Masyarakat yang sakit menghasilkan wakil rakyat dan abdi negara yang tidak amanah, dusta politik, dan perilaku korup. Karenanya harus lahir generasi baru yang dididik untuk kesatuan ucapan dan perbuatan. Untuk belajar hidup bermartabat, di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Bukan untuk *nrabas* nilai-nilai ujian. Belajar untuk kehidupan yang santun, untuk akhlak mulia, bukan untuk lulus ujian. Sangat berat pekerjaan guru yang hidup di *zaman edan*. Guru harus tetap waras, mendidik dengan tulus untuk menjaga titipan Tuhan, alam semesta ini. □d

*) **Dr Muhammad Sayuti**, Dosen UAD Yogyakarta

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini@kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

tersebut tidak diikuti dengan terjadinya peningkatan produksi padi. Kenaikan harga gabah tersebut malah memicu terjadinya penurunan produksi padi. Situasi penurunan produksi padi tersebut mengindikasikan, meningkatnya harga gabah tidak diikuti meningkatnya kesejahteraan petani padi.

Kondisi ini tentunya tidak bisa dibiarkan secara terus menerus mengingat sebagian besar penyumbang kemiskinan tertinggi itu adalah petani. Untuk itu pemerintah baik pusat maupun daerah harus bertindak cepat dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Caranya, dengan membantu petani padi meningkatkan produksinya. Serta menurunkan harga kebutuhan konsumsi serta penurunan biaya produksi pertanian padinya. Jika hal ini berhasil kesejahteraan petani meningkat dan angka kemiskinan akan menurun. □d

*) **Fredy Tjekden SST MSi**, Statistisi BPS Kabupaten Kulonprogo

Pojok KR

Kapolda siap antisipasi kejahatan jalanan.

-- Para penjahat jalanan jangan coba-coba.

Cegah antraks, tingkatkan edukasi.

-- Jangan sampai antraks menyebar.

Kampus kembali menggugat.

-- Jangan dianggap angin lalu.

Berabe

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55232. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Banjir Semarang, Pelajaran Bagi Kota Lain?

MENDENGAR dan melihat tayangan banjir dan longsor Semarang, rasanya miris. Ibukota Jawa Tengah yang diguyur hujan deras sejak Rabu siang hingga malam, telah mengakibatkan banjir dimana-mana. Viral di medsos Stasiun Tawang yang bisa dikatakan terendam, Juga Banjir Kanal Timur meluap. Konon 10 titik masih tergenang antara 15-80 cm.

Semarang banjir orang mengatakan biasa, bahkan ada lagunya. *Semarang kaline banjir, ja sumelang ra dipikir* ○○. Tetapi apakah ini tidak bisa menjadi pelajaran bagi kota lain dalam menata dan merencanakan kota? Bagaimana agar kondisi ini tidak melanda daerah lain. Saya khawatir membangun kota tanpa memperhatikan drainase, kawasan hijau, resapan dan lainnya, semua kota akan bermasalah dengan banjir. Ini tidak bisa dianggap remeh, sepele. □d

*) **Ir Agung, Banyumanik Semarang**

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945. **Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujijanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.